

Musrenbangdes Desa Dabulon Tahun Anggaran 2026 Digelar



Meta Deskripsi: Pelaksanaan Musrenbangdes TA 2026 di Desa Dabulon: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Dabulon digelar Rabu, 3 September 2025 di Gedung Balai Pertemuan Umum. Hadir Camat Lumbis, Babinsa, Babinkamtibmas, Pendamping Desa, BPD, lembaga desa, dan masyarakat. Hasil Musrenbangdes menetapkan alokasi anggaran untuk BUMDes 20%, Kopdes Merah Putih 30%, Pendidikan 10%, Kesehatan 10%, BLT DD 15%, Operasional Pemdes 3%, dan kegiatan lainnya 12%.

Dabulon, 3 September 2025: Pemerintah Desa Dabulon melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun Anggaran 2026 pada hari ini, Rabu (3/9/2025), bertempat di Gedung Balai Pertemuan Umum Desa Dabulon. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Lumbis Drs. Rusmansyah, Babinsa, Babinkamtibmas, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Ketua BPD beserta anggota, lembaga desa, serta masyarakat Desa Dabulon.

Apa itu Musrenbangdes?

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk membahas, menyepakati, dan merumuskan prioritas pembangunan desa. Musrenbangdes berfungsi sebagai wadah demokrasi partisipatif, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan, yang kemudian diakomodir ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Tujuan utama Musrenbangdes adalah memastikan bahwa arah pembangunan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi lainnya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan warga.

Paparan Camat Lumbis dan Pendamping Desa

Camat Lumbis, Drs. Rusmansyah dalam sambutannya menyampaikan pentingnya Musrenbangdes sebagai instrumen perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat desa.

“Musrenbangdes adalah momentum yang sangat penting. Dari forum ini, kita bisa memastikan setiap anggaran desa dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Saya mengajak masyarakat Dabulon untuk terus mendukung program desa yang telah disepakati bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Pendamping Desa menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

“Keterlibatan masyarakat bukan sekadar hadir, tetapi juga aktif memberi masukan. Keputusan hari ini akan berdampak pada pembangunan desa setahun ke depan. Karena itu, aspirasi masyarakat menjadi pondasi utama dalam penyusunan RKPDDes,” jelasnya.

Paparan Kepala Desa Dabulon

Kepala Desa Dabulon, **Anuar Sadat**, dalam kesempatan ini menyampaikan hasil prioritas Musrenbangdes Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama.

“Kami berkomitmen untuk mengelola Dana Desa secara transparan dan tepat guna. Dalam Musrenbangdes ini, masyarakat bersama pemerintah desa menyepakati pembagian alokasi anggaran sebagai berikut:

- BUMDes: 20%
- Kopdes Merah Putih: 30%
- Pendidikan: 10%
- Kesehatan: 10%
- BLT DD: 15%
- Operasional Pemdes: 3%
- Kegiatan lainnya: 12%,” jelas Anuar Sadat.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa fokus pembangunan Desa Dabulon tahun depan akan diarahkan pada penguatan ekonomi desa melalui BUMDes dan Kopdes Merah Putih, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kami berharap dengan alokasi ini, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, akses pendidikan dan kesehatan lebih baik, serta ekonomi desa berkembang secara mandiri,” tambahnya.

Suasana Musyawarah dan Antusiasme Masyarakat

Musrenbangdes berlangsung secara kondusif dengan diskusi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Beberapa warga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan pelayanan sosial. Semua masukan dicatat dan menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam program kerja desa.

Kesimpulan

Pelaksanaan Musrenbangdes Desa Dabulon Tahun Anggaran 2026 mencerminkan komitmen pemerintah desa bersama masyarakat untuk membangun desa secara partisipatif, transparan, dan berkeadilan. Alokasi anggaran yang telah ditetapkan diharapkan mampu mendukung

pembangunan ekonomi desa, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.